LAPORAN HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI



STASIUN METEOROLOGI KELAS I SUPADIO PERIODE JANUARI - MARET 2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I SUPADIO

Disahkan di Kubu Raya, Hari Jumat, 1 April 2023

Kepala Stasim Meteorologi Kelas I Supadio

Lina Marciyanti, S.Kom. M.Si

19 69 922 199703 2 001

TIM REDAKSI

Pengarah : Erika Mardiyanti, S.Kom., M.Si

Tim Survei : Ade Supriyatna, S.Tr

Debiriansaputri, S.Si Fanny Rahma F, S.Tr

Herly Pahlefi, S.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan Tuntunan-Nya, akhirnya penyusunan Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Terhadap Pelayanan MKG di Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio Triwulan I Tahun 2024 selesai disusun. Laporan ini diharapkan dapat menjadi gambaran persepsi masyarakat terhadap indeks persepsi korupsi di Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio.

Penyusunan Survei Persepsi Korupsi merupakan suatu keharusan bagi lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Kami berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi customer dan stakeholder, khususnya segenap jajaran pimpinan di Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio dan penyedia layanan publik dalam mendukung proses percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

Kubu Raya, 1 April 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM REDAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	
METODOLOGI	4
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
PENUTUP	13

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
- 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan
- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 6 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

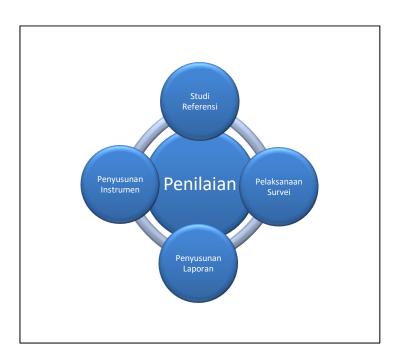
Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Model alur penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 2. Pertanyaan Survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup						
1	Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi						
	menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)						
2	Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah						
	ditetapkan dengan imbalan uang/barang						
3	Tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi pada pelayanan						
4	Petugas pelayanan tidak diskriminatif						
5	Tidak terdapat pungutan liar						
6	Petugas pelayanan tidak meminta/ menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan						
	yang diberikan						
7	Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan						
8	Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan pelayanan						
9	Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang						
	tersedia						

Tabel 3. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Gambaran Umum Responden

Responden merupakan pengguna jasa dan informasi Meteorologi, Klimataologi, Geofisika di Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio. Responden yang mengisi formulir kuesioner sebanyak 34 orang. Karakteristik responden secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Gambaran Umum Responden

1	Masyarakat Umum	31
2	Instansi Terkait	3

3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator



Hasil persepsi responden bahwa prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan KKN yang ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 4.00.



Hasil persepsi responden bahwa perilaku petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang menunjukkan hasil pada indeks mencapai 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja perilaku petugas pelayanan bersih dari tindakan penyalahgunaan dengan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang ditetapkan dengan imbalan uang/barang.



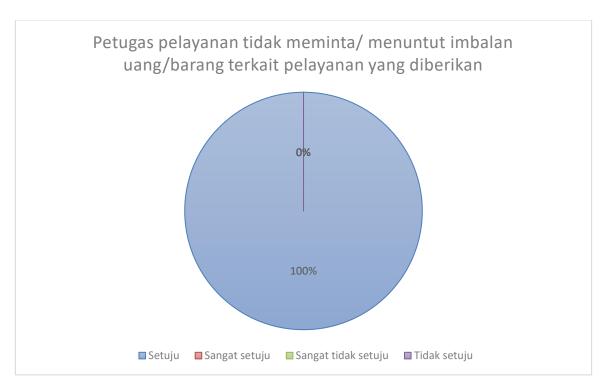
Hasil persepsi responden bahwa pelayanan bersih dari praktek pencaloan/perantara yang tidak resmi. Ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 4.00.



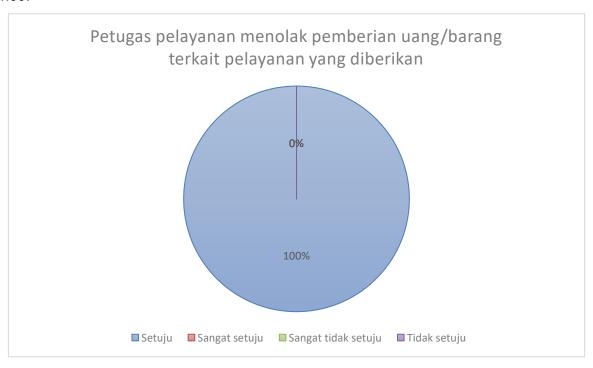
Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan bersih dari perilaku diskrimatif. Ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,98.



Hasil persepsi responden bahwa pelayanan bersih dari pungutan liar. Ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 4.00.



Hasil persepsi responden bahwa pelayanan bersih dari permintaan/tuntutan imbalan uang/barang dari petugas. Ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 4.00.



Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan menolak pemberian hadiah berupa uang/barang terkait pelayanan yang diberikan. Ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 4.00.



Hasil persepsi responden bahwa pelayanan bersih dari diskriminasi dalam penanganan pengaduan yang ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,98.



Hasil persepsi responden bahwa produk pelayanan sesuai dengan daftar produk layanan yang tersedia yang ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3.98.

E-survey yang disebarkan kepada 34 responden dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Indeks Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholder yang terkait dengan suatu instansi Pemeritahan. Indeks IPAK memiliki skala antara 0 yang artinya sangat korup sampai dengan 100 yang artinya sangat bersih. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik (khususnya instansi pemerintah) yang dalam hal ini adalah pelayanan MKG di Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio. Indeks IPAK merupakan komitmen yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya, berikut nilai rata per indikator IPK dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pertanyaan	Setuju	Sangat setuju	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Nilai
1	34	0	0	0	4.00
2	34	0	0	0	4.00
3	34	0	0	0	4.00
4	33	1	0	0	3.98
5	34	0	0	0	4.00
6	34	0	0	0	4.00
7	34	0	0	0	4.00
8	33	1	0	0	3.98
9	33	1	0	0	3.98
				Rata - rata	3.99

Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai persesi korupsi Unit Pelayanan dipersepsikan BERSIH DARI KORUPSI oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Nilai IPAK yang diperoleh sebesar **99.18** (kisaran nilai BERSIH DARI KORUPSI adalah 81,26 – 100,00).

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio diperoleh informasi Indeks Persepsi Korupsi 3.99 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil e-survey IPAK terhadap pelayanan MKG di Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio, maka perlu upaya untuk monitoring dan evaluasi hasil IPAK secara berkala agar dapat meningkatkan kualitas layanan yang bersih dari korupsi.